

EVALUASI KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGANI KEBAKARAN DI KELURAHAN SIDOARJO KABUPATEN TOLITOLI

Nursifa^{1*}

¹Program Studi Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli
Jl. Kampus Umada, No. 1, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah

*Email : nurahifatolis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani kebakaran Di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Tolitoli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan jenis data primer berupa wawancara dan observasi, Informan sebanyak delapan orang, tiga orang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolitoli dan lima orang masyarakat yang pernah menjadi korban bencana kebakaran di kelurahan sidoarjo Kabupaten Tolitoli dan jenis data skunder berupa dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan evaluasi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana kebakaran di Kabupaten Tolitoli dikaji menggunakan teori evaluasi William Dunn, lima indikator atau kriteria evaluasi adapun indikator yang digunakan antara lain indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Resposivitas, Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolitoli dalam menangani Kebakaran di Kelurahan Sidoarjo masih belum optimal, karena saat ini Badan Penangulangan Bencana Daerah Tolitoli masih dibatasi oleh sumber daya manusia yang ahli dalam menangani bencana kebakaran tersebut sehingga penanggulangannya belum dikatakan efektif, dari segi kecukupan masyarakat masih membutuhkan air bersih dan tidak tepatnya tempat pembuatan hunian sementara sehingga masih meresahkan masyarakat disebabkan oleh banjir. Tapi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli sudah berusaha memberikan penanggulangan yang terbaik bagi masyarakat di Kelurahan sidoarjo, hanya saja masih mempunyai keterbatasan dan kekurangan.

Kata kunci: bencana, kebakaran, BPBD, tolitoli

ABSTRACT

This study aims to determine how the Regional Disaster Management Agency's Work Evaluation deals with fires in the Sidoarjo Village, Tolitoli Regency. The method used in this study is a qualitative research method, data collection techniques with primary data types in the form of interviews and observations, eight informants, three employees of the Tolitoli Regional Disaster Management Agency and five people who have been victims of the fire disaster in the Sidoarjo Village, District Tolitoli and secondary data types in the form of documentation. This study shows that the evaluation of the work of the Regional Disaster Management Agency in dealing with fire disasters in Tolitoli Regency was studied using William Dunn's evaluation theory, five indicators or evaluation criteria. In contrast, the indicators used included indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy. Based on the results of the research on the Work Evaluation of the Tolitoli Regional Disaster Management Agency in dealing with fires in the Sidoarjo Village, it is still not optimal because currently, the Tolitoli Regional Disaster Management Agency is still limited by human resources who are experts in dealing with the fire disaster so that the response has not been said to be effective, in terms of adequacy the community still needs clean water and the place for making temporary housing is not precise, so it is still troubling the community due to flooding. However, the Regional Disaster Management Agency of Tolitoli Regency they have tried to provide the best response for the people in Sidoarjo Village. It is just that they still have limitations and shortcomings.

Keywords: disaster, wildfire, BPBD, tolitoli

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis. Bencana yang diakibatkan oleh faktor alam yaitu berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam yaitu berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Lembaga Pemerintah Non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Badan penanggulangan bencana daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) ditingkat provinsi dan satuan pelaksana penanganan bencana (Satak PB) ditingkat Kabupaten/kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggara penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penanggulangan bencana (Awusi et al., 2018).

Bencana alam yang sangat sering terjadi di beberapa tahun ini diberbagai daerah salah satunya di daerah Kabupaten Tolitoli adalah kebakaran. Bencana kebakaran sangat merajalela diberbagai kota, kebakaran ini sangat dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia berupa, aliran listrik yang koslet dan kecerobohan dari manusia itu sendiri. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada aspek perekonomian dan aspek psikologis korban bencana tersebut (Suartini et al., 2015).

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah Pada tahun 2020 ini sudah terdapat 5 titik tempat terjadinya bencana kebakaran salah satunya yaitu di Kelurahan Sidoarjo. Kebakaran ini dikabarkan kebakaran terbesar di Sulawesi Tengah yang terdiri 134 rumah yang terbakar, 9 rumah yang terdampak dan 1 korban jiwa. Bencana ini tentu menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Tolitoli terutama pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan cara rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat masalah ataupun kendala sehingga hasil yang diinginkan belum maksimal. Maka dari itu, penulis melakukan observasi terlebih dahulu. Dari hasil observasi tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul pada kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli yaitu :

1. Tidak tepatnya dan cukup lambat pembuatan hunian sementara (Huntara)
2. Kurangnya sumber daya manusia
3. Masyarakat masih membutuhkan air bersih

Melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis mengadakan suatu penelitian dan mengangkat masalah ini dengan sebuah judul Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli dalam menangani kebakaran di Kelurahan Sidoarjo. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan suatu masukan yang nantinya mempengaruhi pula pada keberlangsungan organisasi yang telah didirikan ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bahwa metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2021. Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tolitoli. Lokasi ini sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa Evaluasi yang berkaitan dengan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, yang masih kurang. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 8 orang informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang bersumber dari obyek penelitian, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitan dengan objek dan tujuan penelitian yang berasal dari dokumen, buku-buku, internet dan jurnal. Data sekunder itu data yang diperlukan guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini, dan digunakan untuk menganalisa yang berkaitan dengan Evaluasi kerja. Aktivitas dalam analisis data berupa 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian Data, dan 4. Penarikan kesimpulan (Anggara, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Menurut Dunn, (2003) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau nilai moneterinya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak **Adam Lamusu, ST** selaku Staf di bidang analisis bencana mengatakan bahwa:

“Kualitas harus didukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang sudah terlatih dan khusus dalam penanggulangan kebakaran itu masih kurang dan tidak ada mobil pemadam hanya mobil persediaan air. Jadi dalam tugas dan fungsi bisa dibilang dijalankan secara maksimal dengan bagaimanapun kondisinya kita tetap menangani sesuai dengan kemampuan, mengupayakan semaksimal mungkin dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM”. (*Wawancara 3 september 2021*)

Berbeda dengan hasil wawancara dengan **Ibu Susilawati** dan **Rohani Ismail** masyarakat korban bencana kebakaran mengatakan bahwa :

“Tingkat kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah sangat bagus, karena mereka selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sebagai masyarakat korban bencana kebakaran jika dilihat dari bantuan logistik yang sangat banyak dan BPBD juga sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik walaupun masih banyak kebutuhan yang masyarakat butuhkan”. (*Wawancara 8-9 September 2021*)

Penulis menyimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolitoli belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada permasalahan yang didapat dalam penanggulangan tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia yang khusus dalam menangani kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli dan terbatasnya sarana dikarenakan minimnya dana dari daerah.

Efisiensi

Menurut Dunn, (2003a), Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi”.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak **Nuralam, ST** Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tolitoli sebagai informan kunci yaitu:

“Usaha yang dilakukan bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tolitoli dari luar tempat kejadian dimedia-media massa agar supaya informasi tersebar luas, bagaimana kita memberikan penanggulangan agar masyarakat aman dan nyaman, berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari menjadi lebih baik jika dilihat dari hunian sementara yang dibuat hanya berukuran 3x4 M, tapi hanya itu kemampuannya”.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Ketua RT IX Bapak **Husain Suaib** Kelurahan Sidoarjo yaitu:

“Menurut saya usaha yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolitoli masih belum cukup karena kita masih menunggu realisasi dari pemerintah terkait pembangunan hunian tetap yang telah dijanjikan tapi sampai sekarang belum ada juga. Tapi kalau dilihat dari penanggulangan pada saat kebakaran sudah lumayan bagus”.

Jadi dapat disimpulkan indikator efisiensi sudah berjalan baik, karena BPBD Kabupaten Tolitoli sudah melaksanakan penanggulangan secara maksimal yang dapat mengatasi masalah dari masyarakat korban bencana kebakaran walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah yang terjadi”.

Hasil wawancara dengan Bapak **Nuralam, ST** Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tolitoli:

“Pihak yang terlibat semua instansi-instansi yang terkait seperti Dinas sosial, Perdagangan, Bkkbn, Tni/Polri dan organisasi luar terjun langsung dalam menangani masyarakat korban bencana kebakaran. Pencapaian hasil BPBD belum dikatakan dapat memecahkan keseluruhan dari masalah korban bencana karena masih banyak yang harus dibenahi masih banyak korban yang keluar. Dengan dana yang terbatas tapi pemerintah daerah tetap berusaha untuk memulihkan keadaan dari korban”.

Ibu **Rohani Ismail** salah satu masyarakat korban bencana kebakaran di Kelurahan Sidoarjo:

“Saya rasa sudah cukup jika dilihat dari penanganan BPBD kurang lebih 3 bulan bantuan itu sangat membantu kebutuhan kami, tapi kendala saat ini kami masih sangat membutuhkan air bersih ada beberapa WC umum yang tidak digunakan karena tidak ada air, dan belum ada penanganan kembali dari pemerintah terkait ini”.

Kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pihak dari BPBD Kabupaten Tolitoli masih merasa kurang dari penanggulangan mereka dan dari masyarakat sendiri juga mengatakan dalam hal logistik sudah sangat cukup tapi masih ada yang mereka butuhkan belum ditangani oleh pemerintah.

Maka dapat disimpulkan dari indikator kecukupan bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan masih ada permasalahan dari masyarakat korban bencana kebakaran belum teratasi oleh pemerintah atau dari BPBD Kabupaten Tolitoli.

Perataan

Menurut (Harahap, 2020), Perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak **Nuralam, ST** Kepala Pelaksana BPBD dan Bapak **Vidya Putra, S.STP** Sekretaris BPBD Kabupaten Tolitoli mengatakan bahwa:

“Pembuatan huntara diratakan sesuai dengan rumah yang hangus atau yang terdaftar karena sebagian masyarakat ada yang memilih tinggal dengan keluarganya, adapun bantuan dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat korban bencana dan dari pihak BPBD sendiri tidak menerima bantuan dari luar dalam bentuk uang dan semua yang dilakukan itu telah menjadi kesepakatan dengan masyarakat”.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu **Rohani Ismail** sebagai masyarakat korban bencana kebakaran mengatakan:

“Sesuai dengan rumah yang hangus tidak melihat berapa kepala keluarga yang ada didalamnya dan kalau bantuan dari BPBD sendiri itu telah disalurkan secara merata adapun dalam berbentuk uang itu dibagikan melalui RT dan sosialisasi kepada masyarakat itu ada. Huntara yang dibangun oleh FPI itu hanya orang-orang yang mendaftar saja sisanya dibangun oleh BPBD”.

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pihak Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli telah melakukan pemerataan kepada korban bencana kebakaran di kelurahan sidoarjo, pemerataan yang dimaksud adalah BPBD telah menyalurkan bantuan secara merata dan membagikan huntara secara adil sesuai dengan

masyarakat korban bencana yang mendaftar untuk dibuatkan hunian sementara karena ada korban yang tidak menetap di lokasi kebakaran tersebut seperti ada yang tinggal bersama keluarga, tinggal di kontrakan atau kos-kosan oleh karena BPBD harus mendata korban yang menetap dilokasi kebakaran untuk dibuatkan hunian sementara (huntara).

Penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik dalam dimensi perataan berjalan dengan baik dikarenakan korban bencana kebakaran tidak ada yang mengatakan bahwa BPBD menyalurkan bantuan secara tidak adil.

Responsivitas

Menurut (Sawir & Pende, 2019) menyatakan bahwa resposivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dalam indikator ini menilai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan apakah BPBD telah memenuhi kebutuhan dari korban bencana kebak. Sejauh ini pada kenyataannya tanggapan masyarakat telah puas dengan program kerja dari Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tolitoli. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh ketua RW Kelurahan Sidoarjo Bapak **Pulu Rahim** dan ibu **Rohani Ismail** yang dimana mereka merupakan bagian dari korban bencana kebakaran tersebut mengatakan bahwa:

“Tidak ada yang kecewa. Dari pihak sosial, kesehatan, semuanya sangat membantu terutama BPBD termasuk penimbunan mereka juga selalu mengawasi dan semua kebutuhan masyarakat pada saat penanggulangan telah terpenuhi jadi respon kami sebagai masyarakat korban bencana sangat bagus”.

Dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas sudah berjalan dengan baik karena didukung dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa masyarakat selaku objek dari penanggulangan BPBD. Mereka merasa puas dan terbantu oleh adanya program tersebut.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara besama-sama (Rusli, 2013).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak **Nuralam, ST** Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tolitolimengatakan bahwa:

“Tempat huntara saat ini jika ada penanganan lanjutan untuk membangun hunian tetap, pembangunan huntara itu sebenarnya tidak strategis. Tapi hanya disitu juga mereka bisa dibangun huntara”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak **Vidya Putra, S.STP** Sekretaris BPBD Kabupaten Tolitoli mengatakan:

“Kalau tempat pembangunan huntara itu sudah keputusan rapat bersama dengan masyarakat tapi sebenarnya huntara tidak boleh dibangun di tempat kebakaran karena masih dalam tahap penimbunan dan akan dilakukan konsultasi tanah oleh pertanahan yang selanjutnya akan dibuatkan hunian tetap”.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu **Rohani Ismail** masyarakat korban bencana kebakaran di Kelurahan Sidoarjo mengatakan:

“Manfaat yang kami peroleh sudah bisa membantu kebutuhan dasar serta sudah dibuatkan tempat tinggal sementara walaupun dengan adanya penimbunan, huntara ini sering terjadi banjir dan belum ada penanganan kembali setelah dibuat renase untuk sebagian masyarakat sini tempat ini belum strategis tapi harus tetap disini”.

Dan dibenarkan oleh Bapak **Alim Purnomo, S.IP.,MM** Lurah di kelurahan Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

“Dilihat dari air naik pada saat hujan sebenarnya tidak strategis hanya saja tidak ada tempat lain yang bisa dibangun huntara”.

Dari hasil penelitian penulis bahwa lokasi pembangunan huntara belum bisa dikatakan strategis karena masih terdapat permasalahan didalamnya, permasalahan yang dimaksud adalah masih terjadi banjir di lokasi huntara jika datang hujan yang sangat deras walaupun pada saat terjadinya banjir BPBD telah bertindak cepat dengan membuat saluran air akan tetapi masih ada air yang tergenang jika hujan melanda. Dilihat dari kondisi huntara saat ini yang tidak memadai jika datangnya banjir tentunya air akan masuk ke dalam huntara tersebut itu yang dapat meresahkan masyarakat korban kebakaran.

Dapat diketahui bahwa indikator ketepatan dalam evaluasi kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten tolitoli belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat korban bencana kebakaran di Kelurahan Sidoarjo.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari enam indikator dalam Evaluasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tolitoli Dalam menangani Kebakaran menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan belum sepenuhnya baik. Dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini sebagai berikut :

1. Indikator Efektivitas tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam menangani terjadinya kebakaran dan terbatasnya sara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolitoli.
2. Indikator Efisiensi sudah berjalan dengan baik, karena usaha yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolitoli sudah maksimal dilihat dari beberapa faktor yaitu: Bertindak cepat pada saat terjadi kebakaran , membuat posko pengungsi untuk korban, mengatasi kebutuhan korban sampai dengan selesai masa penanggulangan serta membuat hunian sementara agar korban layak dibandingkan posko pengungsi tersebut.
3. Indikator Kecukupan belum berjalan dengan baik, karena masyarakat masih kekurangan air bersih untuk digunakan sehari-hari dan belum ada perhatian dari BPBD ataupun pemerintah lain terkait masalah tersebut. Serta masih kurangnya

- hunian sementara yang dibuat dapat dilihat dari masih banyak masyarakat korban kebakaran yang tinggal diluar.
4. Indikator Perataan berjalan dengan baik, Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Tolitoli telah menyalurkan bantuan secara merata dan membagikan hunian sementara secara adil oleh karena itu tidak masyarakat yang merasa kecewa.
 5. Indikator Responsivitas berjalan dengan baik, karena masyarakat memberikan tanggapan yang positif terhadap penanggulangan BPBD Kabupaten Tolitoli. Disebabkan penanganan tersebut sangat bisa mengatasi permasalahan dari segi kesehatan, bantuan makanan, pakaian sampai dengan tempat tinggal sementara.
 6. Indikator Ketepatan tidak berjalan dengan baik, karena masih terjadi banjir sampai dengan masuknya air hujan ke dalam hunian sementara masyarakat korban kebakaran itu dikarenakan tidak tepatnya hunian dibuat dilokasi tempat kebakaran karena lokasi masih baru ditimbun dan masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik: pengantar. In *Kebijakan Publik*.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(2337–5736).
- Dunn, W. N. (2003a). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press*.
- Dunn, W. N. (2003b). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik. In *Gadjah Mada Universitas Press*.
- Harahap, N. (2020). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencan Banjir Di Kota Pekanbaru. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 1).
- Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. *Kebijakan Publik*.
- Sawir, M., & Pende, H. H. (2019). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Suartini, K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Badung dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2014. *Citizen Charter*, 1(2). <https://www.neliti.com/publications/28609/evaluasi-kinerja-badan-penanggulangan-bencana-daerah-bpbd-kabupaten-badung-dalam>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.